

Judul : Ekosistem digital lebih ramah anak: ada fitur verifikasi usia
Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ada Fitur Verifikasi Usia Ekosistem Digital Lebih Ramah Anak

FOTO: FB PRIBADI



Oleh Soleh

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, Twitter menyediakan fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

"Langkah ini penting untuk memastikan anak-anak memperoleh akses internet yang aman, sehat, dan sesuai usia," ujar Oleh, dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Oleh menilai, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan penguatan perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko di ruang siber. Mulai dari paparan konten negatif, eksploitasi data pribadi, hingga potensi kecanduan digital. Keberadaan fitur verifikasi usia ini menjadi instrumen penting untuk menyaring akses terhadap layanan digital tertentu.

Untuk itu, ia memuji PSE yang sudah membuat fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Namun, masih ba-

nyak PSE yang belum melakukannya. "Kami mohon agar setiap PSE mematuhi aturan pelaksanaan PP Tunas ini," tegas dia tanpa merinci siapa saja PSE yang belum menyediakan fitur tersebut.

Menurut Oleh, implementasi PP Tunas tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus diwujudkan melalui kesiapan teknologi dari para *platform* digital dan penyelenggara layanan elektronik. Pemerintah bersama pelaku industri digital diharapkan dapat menyusun standar teknis yang mudah diterapkan, tapi tetap menjamin perlindungan data pribadi pengguna.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah, *platform* digital, sekolah, dan keluarga menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak. Karena itu, harus ada sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital dan pengawasan penggunaan internet pada anak.

Dia berharap, dengan adanya fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua ekosistem digital nasional dapat menjadi lebih aman bagi anak-anak. "Tapi tetap mendukung perkembangan inovasi teknologi di Indonesia," harap mantan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, PP Tunas menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari konten negatif, kecanduan gawai, hingga penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital. Kebijakan itu merupakan upaya Pemerintah menjaga anak-anak Indonesia agar tidak mudah terpengaruh informasi yang salah dan dapat mengikis ciri khas dan identitas bangsa. ■ TIF